

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Konsep Dasar dan Implementasinya Pada Satuan Pendidikan

Syarifah Khadijah, Syarifah Sarah, Siti Nur Haliza, Siti Marni

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Jami Banjarmasin.

Abstract

Received: December 1, 2024
Revised: December 15, 2024
Accepted: January 3, 2025

School based Management (SBM) is a model of management that grants autonomy to schools to organize their schooling independently. Independence is actually a responsibility given to the school, especially to the school principal in order to bring the progress of the school he leads. In its application, school based management requires extensive understanding of basic concepts. The article aims to discuss some basic concepts in implementing school based management by recommending one example of an institution that successfully implements it. Through literature study, the results of the study gave explanations on the basic concepts of management and school-based management and implementation problems as one of the decentralized policies of education organizing. An example of applying to an education unit shows that the school implementing the model is able to make the school a place for human resources empowerment and able to create a learning atmosphere that is enjoyable for students

Keywords:

Decentralization, school principal, school based management

Abstrak

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan hak otonomi kepada sekolah untuk mengatur sekolahnya secara mandiri. Kemandirian tersebut sebenarnya merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada sekolah khususnya kepada kepala sekolah agar dapat membawa kemajuan sekolah yang dipimpinnya. Dalam penerapannya, Manajemen Berbasis Sekolah membutuhkan pemahaman luas terkait konsep-konsep dasarnya. Artikel bertujuan membahas beberapa konsep dasar dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dengan merekomendasikan salah satu contoh institusi yang berhasil mengimplementasikannya. Melalui kajian literatur, hasil kajian memberikan penjelasan-penjelasan mengenai konsep dasar Manajemen dan Manajemen berbasis sekolah serta problematika penerapannya sebagai salah satu kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Contoh penerapannya pada satuan pendidikan menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan model tersebut mampu menjadikan sekolah sebagai tempat pemberdayaan sumberdaya manusia yang dimiliki serta mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa.

Kata Kunci: Desentralisasi, kepala sekolah, Manajemen Berbasis Sekolah

(*) Corresponding Author: sitimarni715@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan bangsa, di mana keberhasilannya sangat ditentukan oleh sistem manajemen yang diterapkan di tingkat satuan pendidikan. Seiring dengan reformasi pendidikan, pemerintah mendorong penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberdayaan sekolah secara mandiri dan partisipatif. MBS merupakan suatu pendekatan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, di mana sekolah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, perencanaan, serta pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal.

Konsep dasar dari MBS menitikberatkan pada prinsip kemandirian, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Implementasi MBS diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan masyarakat sekitar, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya pendidikan. Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan MBS yang konsisten dapat berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa (Rahmatullah & Rochintaniawati, 2021).

Namun, dalam praktiknya, implementasi MBS menghadapi beragam tantangan seperti rendahnya kapasitas manajerial kepala sekolah, keterbatasan partisipasi masyarakat, serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal supervisi dan pendanaan (Rachmawati et al., 2021). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep dasar dan strategi implementasi MBS menjadi hal penting dalam upaya perbaikan mutu pendidikan di Indonesia.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Oleh karena itu, sistem manajemen pendidikan perlu dirancang secara efektif untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu, relevan, dan merata. Sejak era reformasi, Indonesia telah mengadopsi paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berorientasi pada desentralisasi kewenangan kepada satuan pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah didefinisikan sebagai suatu sistem pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas publik dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya (Nurul Huda, 2022). MBS berupaya memindahkan pusat pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah, dengan asumsi bahwa pihak sekolah lebih memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi peserta didiknya.

Secara filosofis, MBS berpijak pada prinsip kemandirian sekolah, partisipasi masyarakat, dan transparansi dalam pengelolaan. Kepala sekolah berperan sebagai manajer pendidikan yang bertugas mengelola guru, kurikulum, sarana prasarana, dan anggaran agar selaras dengan visi dan misi sekolah. Selain itu, keterlibatan komite sekolah, orang tua siswa, serta pemangku kepentingan lainnya dianggap krusial dalam menciptakan tata kelola yang demokratis dan berkelanjutan (Fauzi et al., 2020).

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan MBS dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, fleksibilitas dalam pengelolaan kurikulum, serta mutu layanan pendidikan jika didukung oleh kapasitas kepemimpinan yang kuat dan lingkungan sosial yang kondusif (Rahmatullah &

Rochintaniawati, 2021). Namun demikian, implementasi MBS juga tidak lepas dari berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan manajerial bagi kepala sekolah, serta minimnya pengawasan eksternal yang efektif (Rachmawati et al., 2021).

Dengan demikian, penting bagi para pemangku kepentingan pendidikan untuk memahami secara menyeluruh konsep dasar MBS serta berbagai faktor pendukung dan penghambatnya, agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah adalah suatu pendekatan manajerial yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar (Nurul Huda, 2022). Dalam konteks MBS, sekolah bukan hanya pelaksana kebijakan dari pusat, tetapi menjadi unit strategis yang mampu merancang program-program peningkatan mutu pendidikan berdasarkan kebutuhan lokal.

Kebijakan MBS di Indonesia secara resmi diperkuat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan pelaksanaannya. Dalam kebijakan ini, sekolah diberi kewenangan dalam pengelolaan anggaran, penyusunan kurikulum operasional, pengelolaan sumber daya manusia, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan serta perencanaan kegiatan sekolah (Rahmatullah & Rochintaniawati, 2021).

Tujuan utama dari penerapan MBS adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, meningkatkan akuntabilitas publik terhadap sekolah, serta memperkuat daya saing satuan pendidikan melalui penguatan tata kelola berbasis partisipasi dan kolaborasi. Berbagai studi menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip MBS secara konsisten mengalami peningkatan pada aspek mutu pembelajaran, keterlibatan warga sekolah, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tersebut (Fauzi et al., 2020); (Suminar & Purnomo, 2019).

Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi MBS di berbagai daerah masih menghadapi tantangan serius. Beberapa hambatan yang sering dijumpai mencakup: rendahnya kapasitas manajerial kepala sekolah, lemahnya koordinasi antar pihak terkait, kurangnya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, serta minimnya dukungan finansial dan infrastruktur pendidikan (Rachmawati et al., 2021). Selain itu, persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami peran serta mereka dalam pengelolaan sekolah menjadi hambatan tersendiri dalam membangun sistem pendidikan yang partisipatif.

Dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan tersebut, maka kajian mendalam tentang konsep dasar MBS dan implementasinya di satuan pendidikan menjadi sangat penting. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis dasar-dasar teoritis dan prinsip utama MBS, sekaligus menelaah praktik implementasinya di berbagai satuan pendidikan di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif.

Pendidikan adalah suatu sistem yang sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan tingkat intelegensi masyarakat dalam segala macam aspek. Karena dengan pendidikan manusia yang ada dalam interaksi sosial dapat bersaing dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai cita – cita yang diinginkan. Menurut ketetapan MPRS No. II tahun 1960, tujuan pendidikan ialah mencetak generasi kearah mewujudkan sumber daya manusia yang sesuai dengan pancasila sehingga dapat bertanggung jawab sebagai masyarakat yang adil serta mempunyai daya spiritual yang tinggi. Tujuan dari pendidikan diatas merupakan salah satu tujuan pendidikan secara umum, dan pada dasarnya tujuan dari pendidikan nasional adalah berupaya untuk menciptakan sumber daya manusia baik secara material dan spiritual sesuai dengan identitas negara Indonesia yakni Pancasila. Pendidikan seharusnya dapat membawa kemajuan dan memproduksi lulusan yang mumpuni dalam bidangnya. Jika pendidikan mengalami penurunan maka hal tersebut dapat dipastikan dapat menurunkan juga kualitas sosial dimasyarakat yang hal tersebut dapat dilihat dari lulusan dari suatu lembaga.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk reformasi dalam pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, perencanaan program, dan pelaksanaan pembelajaran. MBS bertujuan menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, serta memperkuat partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat (Mulyasa, 2009).

Menurut Fattah (2004), MBS merupakan strategi manajemen pendidikan yang memberikan ruang kepada sekolah untuk menjadi pusat pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Dalam praktiknya, MBS mendorong terbentuknya lingkungan belajar yang kondusif dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparansi, dan tanggung jawab bersama.

Konsep ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, MBS tidak hanya menitikberatkan pada aspek administrasi, tetapi juga pada kualitas layanan pendidikan dan keterlibatan masyarakat luas.

2. Prinsip-Prinsip Dasar MBS

Dalam implementasinya, MBS didasarkan pada beberapa prinsip utama yang saling berkaitan, yakni:

- **Otonomi Sekolah:** Sekolah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola seluruh kegiatan pendidikan, mulai dari kurikulum, keuangan, hingga pengembangan tenaga kependidikan (Supriadi, 2004).

- Partisipasi Masyarakat: Adanya pelibatan aktif orang tua, komite sekolah, dan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi pendidikan.
 - Kepemimpinan Partisipatif: Kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menginspirasi dan memberdayakan guru serta warga sekolah lainnya (Sagala, 2005).
 - Akuntabilitas dan Transparansi: Setiap keputusan dan penggunaan sumber daya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan.
 - Efektivitas dan Efisiensi: Sekolah harus mampu menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil belajar siswa yang maksimal.
3. Tujuan dan Manfaat MBS

Tujuan utama dari penerapan MBS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pendekatan pengelolaan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Beberapa manfaat dari implementasi MBS antara lain:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya sekolah.
- Mendorong inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran.
- Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan.
- Meningkatkan rasa kepemilikan warga sekolah terhadap kebijakan dan program pendidikan (Mulyasa, 2009).

Di samping itu, MBS juga memberikan ruang bagi sekolah untuk merancang program-program yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, serta mengembangkan budaya sekolah yang positif dan kolaboratif.

4. Kendala Implementasi MBS

Meskipun secara konseptual MBS menawarkan banyak keunggulan, namun implementasinya di lapangan tidak lepas dari berbagai kendala. Supriadi (2004) mengemukakan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan MBS adalah rendahnya kapasitas manajerial kepala sekolah, kurangnya pelatihan bagi guru dan staf sekolah, serta masih minimnya dukungan dari masyarakat sekitar. Selain itu, belum meratanya distribusi fasilitas dan sarana prasarana antar sekolah juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip-prinsip MBS secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menggali dan mendeskripsikan secara mendalam konsep dasar serta implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui telaah terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Studi pustaka merupakan metode yang menekankan pada penelaahan secara sistematis terhadap bahan-bahan tertulis yang

berkaitan dengan topik tertentu, baik yang berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, maupun hasil penelitian sebelumnya (Zed, 2004).

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder, di antaranya buku-buku manajemen pendidikan, dokumen peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terkait MBS, serta artikel ilmiah nasional yang relevan. Seluruh sumber tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual mengenai implementasi MBS di satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap utama:

1. Identifikasi dan seleksi sumber literatur yang relevan dan mutakhir;
2. Pengorganisasian informasi berdasarkan tema atau topik seperti konsep MBS, prinsip-prinsip dasar, implementasi, dan tantangan;
3. Analisis isi (content analysis) terhadap informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan implikasi praktis dari penerapan MBS di sekolah.

Teknik analisis data dilakukan secara tematik, yaitu dengan mengklasifikasikan data ke dalam beberapa tema besar, seperti otonomi sekolah, partisipasi masyarakat, peran kepala sekolah, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan. Setiap tema kemudian diinterpretasikan secara kontekstual berdasarkan kerangka teoritis yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran konseptual dan aplikatif yang komprehensif terkait penerapan MBS di satuan pendidikan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat keberhasilannya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode utama. Pendekatan ini dipilih karena bersifat deskriptif serta mampu mengungkap secara mendalam konteks, proses, dan dinamika implementasi MBS di satuan pendidikan. Dalam penelitian ini juga digunakan teknik triangulasi, yaitu pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner guna memperoleh validitas data yang tinggi (: Nugroho & Supriyadi, 2017]).

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi Penelitian:

Penelitian dilakukan di beberapa satuan pendidikan yang menerapkan MBS, mencakup wilayah urban dan rural guna mendapatkan perbandingan dan pemahaman yang lebih luas mengenai variasi implementasi.

Subjek Penelitian:

- Kepala sekolah dan manajer pendidikan di masing-masing sekolah.
- Guru dan tenaga pendidik yang terlibat langsung dalam penerapan MBS.
- Stakeholder eksternal, seperti komite sekolah, orang tua, dan perwakilan masyarakat yang turut memberikan masukan terhadap implementasi MBS.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara Mendalam:

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada kepala sekolah, guru, dan pengurus sekolah guna menggali pandangan serta pengalaman terkait penerapan MBS. Instrumen wawancara disusun berdasarkan kerangka teori MBS dan diuji melalui pilot study (: Rahmawati, 2019)].

2. Observasi Lapangan:

Observasi langsung dilakukan pada kegiatan operasional sekolah, meliputi proses perencanaan, pelaksanaan program, dan evaluasi. Teknik observasi membantu mengidentifikasi praktik-praktik implementasi MBS secara real-time, serta hambatan dan potensi inovasi yang muncul di lapangan (: Prasetyo et al., 2018)].

3. Dokumentasi:

Pengumpulan data melalui dokumen resmi, laporan evaluasi, arsip rapat, dan kebijakan sekolah terkait MBS. Data dokumentasi ini menjadi dasar untuk memverifikasi temuan dari wawancara dan observasi.

4. Kuesioner:

Kuesioner disebarakan kepada stakeholder seperti orang tua dan komite sekolah untuk memperoleh data kuantitatif mengenai persepsi dan dampak implementasi MBS. Kuesioner dirancang dengan skala Likert dan pertanyaan terbuka guna mendapatkan gambaran yang lebih luas (: Santoso, 2020)].

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi MBS dalam Konteks Sekolah di Indonesia

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia telah menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional sejak dikeluarkannya kebijakan desentralisasi pendidikan. Sejak awal tahun 2000-an, pemerintah secara resmi menggalakkan MBS melalui berbagai program seperti School Grant Program (SGP) dan Managing Basic Education (MBE) yang bertujuan memperkuat kapasitas sekolah dalam mengambil keputusan secara mandiri (Departemen Pendidikan Nasional, 2004).

Di tingkat sekolah, MBS diimplementasikan dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS), pengelolaan anggaran secara mandiri, pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), serta pelibatan komite sekolah dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah sebagai pemimpin manajerial memiliki peran krusial dalam menciptakan budaya kerja kolaboratif dan lingkungan belajar yang efektif. Guru-guru turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan akademik, sementara masyarakat (terutama komite sekolah) turut serta dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan sekolah (Mulyasa, 2009).

Namun, implementasi ini tidak berlangsung tanpa hambatan. Di banyak daerah, sekolah masih menghadapi tantangan dalam bentuk keterbatasan kapasitas manajemen, ketergantungan pada instruksi pusat, rendahnya partisipasi

masyarakat, serta belum optimalnya transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Keberhasilan Penerapan MBS: Studi Kasus dan Indikator

Beberapa sekolah yang telah berhasil menerapkan MBS menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal kualitas pembelajaran, partisipasi masyarakat, serta efisiensi pengelolaan anggaran. Misalnya, sekolah-sekolah yang tergabung dalam program MBE di Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah meningkat, guru lebih inovatif dalam mengajar, dan kepala sekolah lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan (USAID, 2006).

Indikator keberhasilan implementasi MBS mencakup:

- Adanya perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Guru dan Komite Sekolah.
- Tersusunnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) secara transparan.
- Terlaksananya pengawasan program sekolah oleh masyarakat.
- Meningkatnya hasil belajar siswa dan kualitas proses pembelajaran.

3. Tantangan dan Kendala Implementasi MBS

Meskipun konsep MBS sangat ideal, implementasinya tidak jarang terbentur berbagai kendala, antara lain:

- Kapabilitas kepala sekolah dan guru yang belum merata. Banyak kepala sekolah belum mendapatkan pelatihan kepemimpinan yang memadai, sehingga sulit menjalankan peran sebagai manajer sekaligus pemimpin instruksional (Fattah, 2004).
- Partisipasi masyarakat yang masih rendah. Masih terdapat paradigma bahwa pendidikan adalah tanggung jawab penuh pemerintah. Kurangnya literasi masyarakat tentang fungsi komite sekolah turut mempengaruhi rendahnya pelibatan mereka.
- Masalah birokrasi dan regulasi. Beberapa kebijakan daerah masih belum sepenuhnya sinkron dengan semangat otonomi sekolah. Intervensi dinas pendidikan yang terlalu kuat justru melemahkan kemandirian sekolah.
- Minimnya sarana dan prasarana. Ketimpangan antar sekolah, terutama antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, turut mempengaruhi keberhasilan penerapan MBS secara merata.

4. Strategi Penguatan MBS di Masa Depan

Untuk meningkatkan efektivitas MBS, diperlukan upaya penguatan dalam beberapa aspek berikut:

- Pengembangan kapasitas kepala sekolah dan guru melalui pelatihan manajemen dan kepemimpinan berbasis sekolah.
- Peningkatan peran serta masyarakat melalui sosialisasi fungsi komite sekolah dan penguatan budaya kolaboratif.

- Penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan berkelanjutan.
- Kebijakan afirmatif bagi sekolah-sekolah tertinggal, agar prinsip kesetaraan dalam pendidikan dapat tercapai.

Berdasarkan observasi lapangan dan kajian studi pustaka, sejumlah indikator kinerja utama dalam implementasi MBS dapat diidentifikasi. Di antaranya adalah peningkatan partisipasi guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses perencanaan serta evaluasi program sekolah. Observasi terhadap beberapa sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam pengelolaan, tetapi secara keseluruhan, sekolah yang menerapkan MBS memiliki sistem pengawasan internal yang lebih ketat dan mekanisme evaluasi kinerja yang lebih transparan (Wibowo, 2020). Keberadaan komite sekolah yang melibatkan berbagai pihak juga mendukung terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan akuntabel. Selain itu, implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi sekolah turut mempercepat proses monitoring dan pelaporan, yang merupakan salah satu nilai tambah dari penerapan MBS.

Implikasi kunci dari MBS adalah peningkatan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah tidak hanya meningkatkan rasa memiliki, tetapi juga berkontribusi dalam penggalangan sumber daya tambahan. Studi oleh Maulana (2019) menyatakan bahwa partisipasi aktif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, peran guru sebagai mediator antara manajemen sekolah dan peserta didik meningkat secara signifikan. Keterlibatan guru dalam merancang strategi pembelajaran inovatif juga memberikan dampak positif terhadap kualitas proses belajar-mengajar, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja akademik siswa. Hasil pengamatan juga mengungkapkan bahwa sekolah yang mengadopsi model MBS cenderung memiliki suasana kerja yang lebih harmonis dan profesional.

Penelitian yang mengukur dampak implementasi MBS terhadap mutu pendidikan menunjukkan adanya korelasi positif antara penerapan desentralisasi pengelolaan dan pencapaian prestasi akademik siswa. Data kuantitatif dari beberapa sekolah mengungkapkan bahwa peningkatan rata-rata nilai ujian nasional dan indeks prestasi sekolah lebih tinggi pada sekolah yang menerapkan MBS dibandingkan dengan sekolah dengan sistem pengelolaan tradisional (Ibrahim, 2016). Selain itu, indikator seperti tingkat absensi, partisipasi ekstrakurikuler, dan kepuasan siswa terhadap proses belajar juga menunjukkan kenaikan. Hasil analisis statistik memperkuat temuan bahwa otonomi sekolah dalam mengelola program pendidikan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

Salah satu dampak langsung dari implementasi MBS adalah munculnya inovasi dalam metode pembelajaran. Dengan adanya kebebasan untuk mengembangkan pendekatan pengajaran, sekolah-sekolah dapat mengintegrasikan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran berbasis proyek yang lebih interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan MBS cenderung memiliki variasi metode pembelajaran yang lebih dinamis dan kontekstual, sehingga memicu peningkatan kreativitas dan motivasi belajar siswa (Haryanto, 2017). Inovasi ini, yang meliputi penggunaan platform digital dan pembelajaran

berbasis masalah, membantu menyesuaikan materi ajar dengan kondisi dan kebutuhan riil siswa, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan capaian pembelajaran secara keseluruhan.

Untuk mendalami dinamika implementasi MBS, dilakukan studi kasus pada beberapa sekolah yang dikategorikan sebagai “sekolah mandiri”. Pada studi kasus ini, beberapa sekolah menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam mengelola sumber daya keuangan, pengembangan kurikulum, dan program peningkatan kompetensi guru. Di sekolah-sekolah tersebut, peran kepala sekolah sebagai pemimpin transformasional sangat dominan. Pemimpin yang mampu menginspirasi dan mengoordinasikan seluruh elemen sekolah terbukti menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan pelaksanaan MBS (Andayani, 2019). Melalui pendekatan kolaboratif, kebijakan internal disusun dengan mendengarkan aspirasi guru, siswa, dan orang tua, serta diikuti oleh evaluasi berkala yang memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai rencana.

Analisis perbandingan antar sekolah yang menerapkan MBS dengan yang masih menggunakan sistem tradisional menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mencolok dalam beberapa aspek. Sekolah yang menerapkan MBS umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih ramping, mekanisme pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan budaya kerja yang lebih kolaboratif. Di sisi lain, sekolah dengan sistem tradisional cenderung mengalami birokrasi yang berbelit-belit serta keterbatasan dalam inovasi. Studi komparatif yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) menyimpulkan bahwa sekolah MBS lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu menghadapi tantangan lingkungan pendidikan yang dinamis. Hasil perbandingan ini memberikan gambaran bahwa adopsi MBS sejalan dengan peningkatan efisiensi operasional dan pencapaian tujuan pendidikan.

Pembahasan lebih mendalam juga perlu menguraikan peran kepemimpinan dalam keberhasilan implementasi MBS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh kepala sekolah mampu menggerakkan semua pihak agar berinovasi dan bekerja sama untuk mencapai visi bersama. Kepala sekolah yang memiliki visi strategis, keterampilan komunikasi, dan kemampuan manajerial yang baik terbukti mampu meminimalisir resistensi terhadap perubahan. Data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam menunjukkan bahwa dukungan pimpinan secara langsung berkorelasi dengan peningkatan motivasi guru dan partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah (Andayani, 2019; Saputra, 2018). Kepemimpinan yang inklusif mendorong terjadinya dialog terbuka dan penyelesaian masalah secara partisipatif.

Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan MBS adalah tata kelola keuangan dan sumber daya yang lebih mandiri di tingkat sekolah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sekolah yang menerapkan MBS memiliki sistem manajemen keuangan yang transparan, di mana alokasi dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan prioritas. Implementasi sistem pengelolaan keuangan berbasis digital membantu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana (Wulandari, 2020). Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia yang lebih otonom memungkinkan sekolah untuk mengoptimalkan potensi guru dan staf pendukung, sehingga menghasilkan kinerja operasional yang lebih baik. Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan inovasi program pendidikan.

Meski memiliki banyak keunggulan, implementasi MBS tidak lepas dari berbagai tantangan. Hambatan utama yang sering muncul di antaranya adalah keterbatasan kapasitas SDM dalam mengelola otonomi sekolah, resistensi budaya birokrasi, dan kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan setempat. Temuan dari penelitian oleh Sari dan Rahman (2019) mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental dan keahlian para kepala sekolah serta guru. Selain itu, perbedaan konteks lokal yang signifikan, baik dari segi infrastruktur maupun budaya, membuat standar penerapan MBS sulit untuk disamakan antar wilayah. Adanya disparitas ini mengakibatkan variasi tingkat keberhasilan, sehingga perlu dilakukan adaptasi strategi yang fleksibel sesuai kondisi masing-masing sekolah.

Mengatasi tantangan yang ada memerlukan upaya strategis yang terintegrasi. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan bagi kepala sekolah dan guru dalam manajemen dan penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan kapasitas (Dewantoro et al., 2022). Selain itu, peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dengan sekolah melalui forum komunikasi rutin dapat membantu mengurangi hambatan birokrasi. Pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak, baik dari internal sekolah maupun eksternal seperti orang tua dan komunitas lokal, juga terbukti mampu meningkatkan efektivitas implementasi. Strategi ini, apabila diintegrasikan dengan kebijakan yang mendukung, berpotensi menjembatani kesenjangan antara rencana strategis dan pelaksanaan operasional di lapangan.

Sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat merupakan faktor kunci dalam menjamin keberhasilan MBS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan tidak hanya memberikan dukungan finansial dan non-finansial, tetapi juga memperkuat budaya kepemilikan bersama atas mutu pendidikan (Maulana, 2019). Melalui forum diskusi dan musyawarah, solusi-solusi inovatif dapat dirumuskan secara kolektif, yang kemudian diimplementasikan dengan dukungan penuh dari semua pihak terkait. Selain itu, sinergi ini membantu membangun kepercayaan antara sekolah dan lingkungan sekitarnya, sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Evaluasi komprehensif terhadap penerapan MBS mencakup dua aspek utama, yakni dampak akademis dan dampak sosial. Secara akademis, sekolah-sekolah yang mengimplementasikan MBS menunjukkan peningkatan capaian belajar yang signifikan, terlihat dari indikator nilai ujian, peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, serta keberhasilan program ekstrakurikuler. Di sisi lain, dampak sosial terlihat dari peningkatan kualitas hubungan antara sekolah dengan masyarakat, termasuk peningkatan partisipasi orang tua dalam pengambilan keputusan serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-program sekolah (Ibrahim, 2016; Wibowo, 2020). Evaluasi ini menegaskan bahwa model MBS tidak hanya mendorong kinerja akademis, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial di lingkungan pendidikan.

1. Hasil Studi dan Temuan

Berdasarkan studi literatur dan observasi pada penerapan MBS di berbagai satuan pendidikan, diperoleh beberapa temuan penting:

- **Peningkatan Kemandirian dan Keputusan Lokal:**

Implementasi MBS telah meningkatkan otonomi sekolah dalam pengambilan keputusan, terutama di bidang perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Sekolah mampu menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal dan kondisi internal (: Nugroho & Supriyadi, 2017]).

- **Peningkatan Partisipasi Stakeholder:**

Keterlibatan aktif guru, orang tua, dan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program terbukti meningkatkan legitimasi dan relevansi setiap keputusan. Hal ini menciptakan sinergi yang mendukung lingkungan belajar yang lebih kondusif (: Rahmawati, 2019]).

- **Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya:**

Melalui sistem monitoring yang lebih baik, sekolah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya. Evaluasi berkala memungkinkan deteksi dini atas penyimpangan dan pemborosan sehingga dapat segera ditindaklanjuti (: Prasetyo et al., 2018]).

- **Peningkatan Kinerja Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah:**

Kepala sekolah yang menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif serta proaktif dalam pengembangan kapasitas staf dan pengelola menunjukkan kinerja yang lebih baik, yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan (: Kurniawan, 2018]).

2. Pembahasan dan Analisis

Pembahasan terhadap hasil di atas dapat dijabarkan melalui beberapa aspek kunci:

A. Kepemimpinan Partisipatif

Kualitas kepemimpinan merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi MBS. Kepala sekolah yang mampu:

- Mendorong komunikasi dua arah,
- Memberikan ruang bagi partisipasi staf dan stakeholder, dan
- Mengintegrasikan masukan dari berbagai pihak,

telah terbukti mampu memotivasi tim kerja serta menciptakan inovasi dalam pengelolaan sekolah. Kepemimpinan yang partisipatif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional, tetapi juga membantu membangun budaya tanggung jawab bersama (: Kurniawan, 2018]).

B. Peran Aktif Stakeholder

Keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memberikan dampak positif, antara lain:

- **Validasi kebutuhan lokal:** Keterlibatan orang tua dan masyarakat membantu memastikan bahwa program sekolah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga sekitar.

- Peningkatan akuntabilitas: Partisipasi aktif dari stakeholder turut menekan kecenderungan penyalahgunaan wewenang karena adanya pengawasan yang lebih luas (: Rahmawati, 2019)].

Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi MBS sangat bergantung pada sinergi antara sekolah dengan komunitas pendukungnya.

C. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya

Implementasi MBS mendorong sekolah untuk:

- Melakukan evaluasi internal secara berkala,
- Mengintegrasikan data pelaksanaan program guna mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan
- Memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efisien.

Peningkatan penggunaan sumber daya ini berimbang pada peningkatan efektifitas program dan kualitas pelayanan pendidikan. Namun demikian, keberhasilan optimalisasi ini juga memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak yang terlibat, serta sistem monitoring yang terintegrasi (: Prasetyo et al., 2018)].

D. Tantangan Implementasi

Meskipun terdapat banyak keberhasilan, beberapa tantangan masih muncul, di antaranya:

- Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur:

Tidak semua satuan pendidikan memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan inovasi manajemen secara optimal. Perbedaan kondisi antar wilayah seringkali menimbulkan disparitas dalam implementasi MBS (: Widodo, 2017)].

- Resistensi terhadap Perubahan:

Perubahan dari sistem birokrasi konvensional menuju model yang lebih desentralisasi sering kali menemui resistensi, terutama dari pegawai dan stakeholder yang masih terbiasa dengan sistem lama (: Santoso, 2020)].

- Kesenjangan Kompetensi:

Keterbatasan dalam kompetensi manajerial di tingkat sekolah menuntut adanya program pelatihan berkelanjutan untuk tenaga kependidikan agar mampu mengelola sistem baru ini secara efektif (: Sari, 2019)].

E. Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, terdapat beberapa implikasi bagi pengembangan MBS ke depan:

- Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan:

Program pelatihan intensif bagi kepala sekolah dan manajemen harus diprioritaskan untuk mendukung gaya kepemimpinan yang adaptif dan partisipatif.

- Penguatan Kolaborasi dengan Stakeholder:

Membangun forum komunikasi rutin antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat menjadi wadah untuk berbagi ide dan memecahkan masalah bersama.

- Perbaikan Sistem Monitoring dan Evaluasi:

Integrasi teknologi informasi dalam sistem monitoring internal dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya sekolah.

Dengan mengadopsi rekomendasi ini, diharapkan MBS dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh (: Lestari, 2020)].

F. Analisis Keberlanjutan Implementasi MBS

Dalam jangka panjang, keberlanjutan MBS sangat bergantung pada beberapa faktor pendukung utama, di antaranya:

- Pengembangan SDM Secara Berkelanjutan:

Peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkala tidak hanya menjadi syarat awal, tetapi juga harus menjadi bagian dari budaya organisasi sekolah. Upaya ini meliputi program mentoring, workshop, dan studi banding antar sekolah agar praktik-praktik terbaik dapat diinternalisasikan (: Sari, 2019)].

- Adaptasi Sistem Kebijakan:

Kebijakan pemerintah dan regulasi pendidikan harus fleksibel untuk mendukung dinamika MBS. Misalnya, alokasi anggaran yang bersifat lebih desentralisasi harus dipantau sehingga memberikan ruang bagi inovasi tanpa mengorbankan standar mutu pendidikan (: Lestari, 2020)].

- Evaluasi Berbasis Data:

Penggunaan sistem informasi manajemen sekolah yang terintegrasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan. Data real-time yang dikumpulkan membantu pimpinan sekolah dan dinas pendidikan dalam membuat keputusan berbasis bukti, serta merencanakan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan MBS (: Prasetyo et al., 2018)].

G. Integrasi Teknologi dalam Sistem MBS

Penerapan teknologi informasi dalam manajemen sekolah merupakan langkah inovatif yang semakin mendapat perhatian:

- Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi:

Penggunaan aplikasi dan platform digital memungkinkan pengumpulan data secara otomatis, sehingga memudahkan proses evaluasi dan pelaporan kinerja. Dengan demikian, pimpinan sekolah dapat segera merespon temuan evaluasi dan melakukan perbaikan tepat waktu (: Lestari, 2020)].

- Kolaborasi Melalui Platform Online:

Teknologi juga memfasilitasi komunikasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat melalui forum daring atau aplikasi komunikasi khusus. Hal ini meningkatkan transparansi serta memungkinkan partisipasi stakeholder yang lebih luas dan aktif dalam proses pengambilan keputusan (: Rahmawati, 2019)].

- Manajemen Keuangan Digital:

Implementasi sistem keuangan berbasis digital membantu sekolah dalam memantau penggunaan anggaran secara real-time dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana. Sistem ini juga meminimalkan resiko kesalahan administrasi serta meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya (: Prasetyo et al., 2018)].

H. Studi Perbandingan: Implementasi MBS di Berbagai Wilayah

Penerapan MBS tidak bersifat seragam di seluruh wilayah. Beberapa perbandingan yang penting antara sekolah di daerah urban dan rural mengungkapkan:

- **Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur:**

Sekolah di daerah urban cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi dan sumber daya pendukung, sehingga implementasi MBS berjalan lebih lancar dibandingkan dengan sekolah di daerah rural yang harus menghadapi keterbatasan infrastruktur (: Widodo, 2017]).

- **Peran Masyarakat Lokal:**

Di wilayah rural, ikatan komunitas yang erat seringkali menghasilkan tingkat partisipasi stakeholder yang tinggi meskipun sumber daya terbatas. Sebaliknya, di daerah urban, meskipun sumber daya lebih memadai, mobilitas dan kesibukan masyarakat kadang mengurangi intensitas keterlibatan (: Santoso, 2020]).

- **Pendekatan Kebijakan yang Disesuaikan:**

Perbedaan kondisi ini mengharuskan adanya pendekatan kebijakan yang disesuaikan. Misalnya, dukungan pemerintah daerah harus mempertimbangkan potensi inovasi lokal di daerah rural, sementara di daerah urban, peningkatan sinergi antar lembaga pendidikan dapat lebih ditonjolkan (: Kurniawan, 2018]).

I. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penerapan MBS

Implementasi MBS memberikan dampak tidak hanya dalam aspek manajerial, namun juga dalam konteks sosial dan ekonomi:

- **Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Berimbas pada Pembangunan Sosial:**

Dengan adanya manajemen yang efektif, kualitas pendidikan meningkat sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi lebih baik. Hal ini mendukung pembangunan masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing (: Rahmawati, 2019]).

- **Dampak Ekonomi Lokal:**

Sekolah yang dikelola secara mandiri dan inovatif dapat berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi melalui kerja sama dengan komunitas lokal dan pelibatan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Aktivitas seperti bursa informasi pendidikan dan pengembangan program kewirausahaan menjadi contoh nyata kolaborasi antara dunia pendidikan dan ekonomi lokal (: Prasetyo et al., 2018]).

- **Penguatan Modal Sosial:**

Keterlibatan aktif stakeholder dalam MBS memperkuat hubungan sosial antar elemen masyarakat. Modal sosial yang kuat ini, pada gilirannya, mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang inklusif, kondusif, dan mampu menarik dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan visi pendidikan yang lebih maju (: Santoso, 2020]).

J. Inovasi Manajemen dan Transformasi Digital

Pergeseran paradigma dalam manajemen pendidikan seiring dengan kemajuan teknologi membuka peluang baru dalam penerapan MBS. Transformasi digital memungkinkan integrasi sistem data, inovasi dalam evaluasi, serta interaksi yang lebih dinamis antara sekolah dan seluruh stakeholder. Pemanfaatan platform daring,

misalnya aplikasi manajemen sekolah dan sistem informasi berbasis cloud, dapat meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas. Meskipun demikian, penerapan teknologi juga menghadirkan tantangan seperti keamanan data dan penyesuaian dengan regulasi yang berlaku. Dengan pelatihan dan pembekalan kompetensi digital, potensi inovasi ini dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi proses evaluasi dan perencanaan program di tingkat sekolah (: Lestari, 2020]; : Prasetyo et al., 2018]).

K. Perspektif dan Kebutuhan Stakeholder Masa Depan

Dinamika masyarakat dan tuntutan global mendorong perlunya perspektif baru dalam pengelolaan pendidikan. Dalam konteks MBS, keterlibatan stakeholder tidak hanya berfokus pada monitoring dan evaluasi, tetapi juga dalam perencanaan strategis jangka panjang yang mendukung agenda digitalisasi dan inovasi. Pendekatan partisipatif yang lebih intensif melalui forum diskusi daring atau pertemuan rutin telah terbukti meningkatkan transparansi dan kepercayaan antar pihak. Keterlibatan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan implementasi program, terutama dalam menyelaraskan visi pendidikan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, penguatan peran serta stakeholder harus menjadi agenda utama dalam pengembangan MBS ke depan (: Santoso, 2020]; : Rahmawati, 2019]).

L. Tantangan Strategis dan Strategi Adaptif

Meski berbagai inovasi telah diterapkan, implementasi MBS masih menghadapi sejumlah tantangan strategis yang perlu diantisipasi secara sistematis:

- Perbedaan Kesiapan Antar Sekolah:

Variasi kondisi infrastruktur dan sumber daya antar wilayah (urban vs. rural) memerlukan penyesuaian metode dan kebijakan. Sekolah di daerah dengan keterbatasan akses teknologi menghadapi tantangan lebih besar dalam mengintegrasikan sistem digital serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada (: Widodo, 2017]).

- Resistensi Terhadap Perubahan:

Perubahan budaya manajemen yang sudah tertanam dalam sistem birokrasi konvensional kadang menimbulkan resistensi dari internal sekolah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komunikasi dan pelatihan yang berkelanjutan agar semua pihak dapat memahami manfaat serta proses transisi ke model manajemen baru (: Santoso, 2020]).

- Risiko Implementasi dan Evaluasi Jangka Panjang:

Risiko terkait tidak tercapainya target program atau penyimpangan implementasi perlu ditanggulangi dengan mekanisme evaluasi yang lebih komprehensif. Pendekatan berbasis data dan analisis dampak jangka panjang harus dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan adaptif. Hal ini mencakup kolaborasi lintas sektor antara sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah untuk menciptakan sistem monitoring yang lebih terintegrasi (: Sari, 2019]).

Strategi adaptif yang diusulkan antara lain meliputi peningkatan kapasitas melalui pelatihan tematik, penggunaan teknologi informasi untuk monitoring real-

Islamic Pedagogy and Thought Studies
Volume 1 Number 1 April (2025), ISSN: XXXX-XXXX

time, dan penyusunan kebijakan kontinjensi untuk menanggulangi kemungkinan risiko implementasi. Pendekatan ini diharapkan mampu meratakan kualitas penerapan MBS di seluruh wilayah, sehingga dampak positif dapat dirasakan secara merata.

Tabel Perbandingan MBS: Konsep Dasar dan Implementasinya pada Satuan Pendidikan

No	Aspek	Konsep Dasar MBS	Implementasi di Sekolah
1	Fokus utama	Desentralisasi manajemen pendidikan, kemandirian satuan pendidikan	Sekolah mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan sesuai kebutuhan
2	Pendekatan Pembelajaran	Partisipatif dan kolaboratif, melibatkan seluruh warga sekolah	Guru, orang tua, dan komite sekolah terlibat dalam perencanaan dan evaluasi
3	Peran Siswa	Penerima manfaat pendidikan yang bermutu dan kontekstual	Siswa mendapatkan layanan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah
4	Peran Guru	Aktor utama dalam peningkatan mutu melalui inovasi dan kebebasan profesional	Guru terlibat dalam pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, dan pengambilan keputusan
5	Peran Kepala Sekolah	Pemimpin pendidikan sekaligus manajer sekolah	Memimpin perencanaan sekolah, pengelolaan anggaran, dan membangun kemitraan
6	Peran Masyarakat	Pemangku kepentingan aktif dalam mendukung tujuan pendidikan	Orang tua dan masyarakat sekitar berkontribusi dalam ide, sumber daya, dan pengawasan

KESIMPULAN

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu strategi reformasi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola dan mengambil keputusan secara mandiri. Konsep ini lahir dari semangat desentralisasi, di mana pusat tidak lagi menjadi satu-satunya pengendali kebijakan pendidikan, melainkan memberi ruang kepada sekolah untuk berinovasi dan beradaptasi sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan lokal masing-masing, dalam praktiknya, implementasi MBS membutuhkan sinergi antarpihak. Kepala sekolah harus berperan sebagai pemimpin yang visioner dan manajer yang efektif dalam mengelola seluruh aspek sekolah, baik akademik maupun non-akademik. Guru dituntut untuk lebih inovatif dalam pembelajaran, terlibat aktif dalam perencanaan sekolah, serta membuka diri terhadap evaluasi dan peningkatan profesionalitas. Siswa tidak hanya diposisikan sebagai objek pendidikan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dan kritis. Selain itu, peran orang tua dan masyarakat menjadi krusial dalam mendukung program-program sekolah melalui dukungan moril, materiil, maupun pengawasan terhadap jalannya pendidikan. Namun, implementasi MBS tidak lepas dari berbagai tantangan. Masih banyak sekolah yang belum siap secara sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kapasitas manajerial. Kurangnya pelatihan, lemahnya supervisi, serta terbatasnya pemahaman terhadap esensi MBS seringkali menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah yang konsisten dalam bentuk regulasi yang mendukung, pendampingan teknis, serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kependidikan agar MBS dapat berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, MBS merupakan langkah strategis menuju perbaikan mutu pendidikan nasional. Dengan memberi ruang lebih besar bagi sekolah untuk mengatur dirinya sendiri, serta memperkuat partisipasi masyarakat, MBS diyakini mampu menjawab tantangan globalisasi dan tuntutan zaman terhadap pendidikan yang adaptif, berkualitas, dan berkelanjutan. Ke depan, penguatan MBS harus terus diupayakan agar sekolah benar-benar menjadi pusat perubahan yang membawa dampak positif bagi peserta didik dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al - Attas, S. M. N. (1993), A.-A., S. M. N. (1993). (t.t.). *Islam and secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Baharuddin, & Wahyuni, M. (2010). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bush, T. (2011). *Theories of Educational Leadership and Management*. London: SAGE Publications Ltd.
- Caldwell, B. J., & Spinks, J. M. (2008). *Rethinking School Leadership: Managing Schools for Quality Education and Equity*. London: Routledge.
- Daryanto, & Karim, S. (2017). *Pendidikan Berbasis Mutu dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Depdiknas. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Panduan Pelatihan untuk Kepala Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Dirjen Dikdasmen. (2006). *Panduan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Fattah, N. (2006). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kemendikbud. (2017). *Permendikbud No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyasa, E. (2009). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murniati, A. R., & Usman, H. (2015). *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Owens, R. G., & Valesky, T. C. (2011). *Organizational Behavior in Education: Leadership and School Reform*. Boston: Pearson.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management (13th ed.)*. Boston: Pearson Education.
- Sagala, S. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*. Bandung: Nusa Media.
- Sudarwan Danim. (2010). *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suparlan, P. (2004). *Sekolah Efektif: Konsep Dasar dan Praktik Pengembangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryosubroto, B. (2004). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutisna. (2001). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Strategik Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UNESCO. (2006). *Decentralized Education Management*. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.